

## **SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 89/PID.B/2015/PN.Mrs)



**OLEH :**

**NURSHEILA MUIS**

**B 111 12 906**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2016**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 89/PID.B/2015/PN.Mrs)

**Oleh**

**NURSHEILA MUIS**

**B 111 12 906**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2016**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 89/PID. B/2015/PN. MAROS)

**Disusun dan diajukan oleh**

**NURSHEILA MUIS**

**B11112906**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Senin 25 Januari 2016  
Dan Dinyatakan Diterima

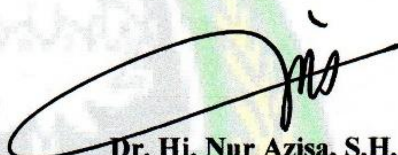
**Panitia Ujian**

**Ketua**



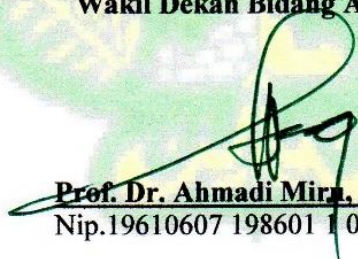
**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.**  
NIP. 195701011896011001

**Sekretaris**



**Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 196710101992022002

**A.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik**



**Prof. Dr. Ahmadi Mirza, S.H., M.H.**  
Nip.19610607 198601 1 003

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : **NURSHEILA MUIS**  
Nomor Pokok : **B 111 12 906**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Proposal : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus  
Putusan Nomor 89/PID.B/2015/PN.Mrs)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, Desember 2015

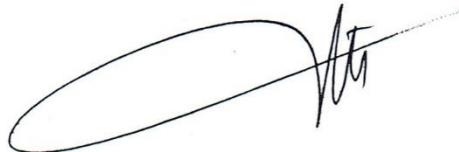
Disetujui Oleh

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si**  
**NIP. 195701011986011001**



**Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
**NIP. 196710101992022002**

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **NURSHEILA MUIS**  
No. Pokok : B111 12 906  
B a g i a n : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan  
(Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Mrs)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.



Makassar, Januari 2016

an. Dekan

Wakil Dekan I,

**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**

NIP. 19610607 198601 1 003



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT atas ahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga pembuatan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir dan sekaligus menjadi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, dengan kerendahan hati khususnya kepada Bapak Muis dan Ibu Mursina sekaligus orang tua yang senantiasa memberi doa, bantuan, tenaga, waktu, motivasi, dan perhatian yang lebih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Begitu pula kepada saudara dan saudariku Nurshima Muis dan Muh. Alfauzy Rezky yang juga memberikan arahan kepada penulis.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik juga tidak terlepas dari bantuan berupa bimbingan, masukan dan saran dari berbagai pihak yang selalu memberikan dukungan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis secara khusus dan penuh kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si, selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan, waktu dan tenaganya dalam mengarahkan dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang juga dengan senantiasa memberikan bantuan berupa tenaga dan waktunya dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Said Karim S.H., M.H., Ibu Dr. Hj. Wiwie Heryani, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan selama penyusunan skripsi penulis.
6. Seluruh Bapak/ibu dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Ketua Pengadilan Negeri Maros dan seluruh staf atas segala bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
8. Teman-teman berbagi cerita suka dan duka RIKUANTIK dan SAHALI terima kasih atas segala dukungan dan saran.
9. Sahabat-sahabatku Nurul Anisa, Dhanik Ayu Reasita Pradanata, Syafira Fadhila dan Asrini Damayanti terima kasih atas dukungan, bantuan, dan motivasi kalian.

10. Keluarga besar Hukum angkatan 2012 PETITUM, teman-teman GARDA, UKM Bola Basket Unhas dan UKM Bola Basket Fakultas Hukum Unhas terima kasih banyak.
11. Teman KKN Unhas Gel. 90 kel. Pallameang, Kec. Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.
12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terakhir penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekeliruan dan kekurangan dari skripsi ini. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis terbuka menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar,

Nursheila Muis



## ABSTRAK

**Nursheila Muis B 11112 906**, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 89/PID.B/2015/PN.Mrs)*. Dibimbing oleh Bapak **Muhadar** selaku pembimbing I dan Ibu **Nur Azisa** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana pembunuhan dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor : 89/PID.B/2015/PN.Mrs.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros dengan lokasi di Pengadilan Negeri Maros. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penulis berusaha menelaah bahan hukum yang diperoleh dari beberapa buku dan literatur, termasuk Putusan Hakim, Surat Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa serta hasil penelitian lapangan yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Maros. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif, teknik analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Perkara Pidana Nomor 89/PID.B/2015/PN.Mrs telah sesuai. Majelis Hakim menyatakan terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan pada Perkara Pidana Nomor 89/PID.B/2015/PN.Mrs, kurang tepat. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa tergolong ringan dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

## ABSTRACT

**Nursheila Muis B 11112 906**, Judicial Review On Criminal Law Homicide (Case Study of Decision Number 89/PID.B/2015/PN.Mrs) Supervised by Mr. **Muhadar** as Supervisor I and Mrs. **Nur Aziza** as Supervisor II.

This research is purposed to acknowledge the application of material law towards criminal law homicide and the legal consideration of judge in convicting on Decision Number 89/ PID.B/2015/PN.Mrs.

This research was conducted in Kabupaten Maros at Pengadilan Negeri Maros. To achieve this purpose, the writer did the research by using library research and field research. The writer tried to analyze the material law earned from several books and literatures, including Verdict, Indictment even Prosecution and the result of field research earned by collecting the materials in a form of interview conducted directly to respondents, in this case, that is Judges of Pengadilan Negeri Maros. This research is normative descriptive research, analysis data technique qualitatively towards primary data and secondary data which continue be served in descriptive form.

The result of this research shows that the application of criminal law material towards the offender of homicide criminal law in Criminal Case Number 89/PID.B/2015/PN.Mrs is corresponding. Panel of Judges declared the offender H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso had proven legally and convinced guilty in homicide criminal law as regulated and be threatened punishment in Article 338 KUHP and declared that the offender had not proven legally and convinced guilty in committing criminal act of premeditating murder in Article 340 KUHP as in primary indictment.

The Consideration of the Judge in convicting the Crime towards the Offender of Homicide Criminal Law on Criminal Case Number 89/PID.B/2015/PN.Mrs, was less precise. Panel of Judges convicted the offender, H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso, with imprisonment for 5 (five) years. The punishment convicted by Panel of Judges to the offender was classified as light in the case of homicide criminal law.

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tindak Pidana .....	8
1. Pengertian Tindak Pidana .....	8
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	10
a. Unsur-unsur Subjektif .....	11
b. Unsur-unsur Objektif .....	17
B. Tindak Pidana Pembunuhan.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	18
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	20

a. Tindak Pidana Pembunuhan Biasa .....	20
b. Tindak Pidana Pembunuhan Berkualifikasi .....	21
c. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	23
d. Tindak Pidana Pembunuhan Anak .....	24
e. Tindak Pidana Pembunuhan Atas Permintaan Korban .....	27
f. Kesengajaan Mendorong Orang Lain Melakukan Bunuh Diri .....	28
g. Tindak Pidana Menyebabkan atau Menyuruh Menyebabkan Gugurnya Kandungan atau Matinya Janin yang Berada dalam Kandungan .....	30
C. Pidana dan Pemidanaan .....	31
1. Tujuan Pidana .....	32
2. Jenis-jenis Pidana .....	34
D. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara .....	36
1. Pertimbangan Yuridis .....	36
2. Hal yang Meringankan dan Memberatkan Pidana .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Lokasi Penelitian .....	39
B. Jenis dan Sumber Data .....	39
C. Teknik Pengumpulan Data .....	40
D. Analisis Data .....	41

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 42**

### **A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Tindak**

#### **Pidana Pemunuhan dalam Perkara Nomor**

89/PID.B/2015/PN.Mrs..... 42

1. Posisi Kasus..... 42

2. Dakwaan Penuntut Umum..... 45

3. Tuntutan Penuntut Umum ..... 52

4. Amar Putusan..... 53

5. Analisis Penulis ..... 55

### **B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap**

#### **Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan pada Perkara Pidana**

Nomor 89/PID.B/2015/PN.Mrs ..... 57

1. Pertimbangan Hakim ..... 67

2. Putusan Hakim ..... 71

3. Analisis Penulis..... 72

## **BAB V PENUTUP ..... 78**

A. Kesimpulan ..... 78

B. Saran ..... 79

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, menjadikan manusia sebagai serigala bagi manusia yang lain. Kesalahan pun tidak menjadi hal yang mustahil dilakukan bagi manusia, baik itu disengaja maupun tidak disengaja yang bisa merugikan manusia lain. Namun disisi lain manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain dan selalu berkumpul membentuk kelompok manusia, sehingga manusia juga disebut sebagai makhluk sosial.

Adanya sikap pembawaan pribadi yang selalu mementingkan diri sendiri dan kebutuhan membentuk kelompok, membuat manusia membutuhkan suatu aturan yang dapat mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Aturan pun dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan disebut sebagai norma atau kaidah.

Norma atau kaidah dapat digambarkan sebagai aturan tingkah laku atau sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu. Norma yang berfungsi untuk mengatur berbagai

jenis kepentingan di dalam masyarakat, memiliki berbagai jenis. Salah satu jenis norma yang mengandung unsur kahrusan atau moralitas dan mengakui sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya adalah norma hukum.

Norma hukum dilahirkan dari asas hukum, kemudian norma hukum yang melahirkan aturan hukum. Hukum dianggap sebagai suatu sistem utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Hukum mengatur manusia dan kehidupannya sebagai anggota masyarakat, sehingga hukum harus diterima secara nyata oleh masyarakat serta digunakan sebagai *living law*.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum adalah pedoman dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.<sup>1</sup> Menurut Achmad Ali mengenai hukum,<sup>2</sup>

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah

---

<sup>1</sup> Mohammad Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>2</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm 30-31.



tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan saksi yang sifatnya eksternal.

Munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang lebih teroganisir dengan baik serta kelompok cendekia di dalam masyarakat menegaskan bahwa negara membutuhkan hukum diberbagai bidang. Salah satu sistem hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai perkembangannya adalah hukum pidana. Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya belum tertulis.

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu sistem negara yang mengadakan aturan-aturan yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut pada suatu masyarakat. Hukum pidana juga merupakan bagian dari hukum publik, dimana objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan masalah mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah.

Kepentingan hukum dilindungi apabila kepentingan itu telah menjadi kepentingan umum. Kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana, biasanya dikelompokkan ke dalam tiga

golongan, yaitu kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum perseorangan.<sup>3</sup>

Kepentingan hukum negara adalah kepentingan hukum dari negara secara keseluruhan mengenai keberlanjutan, ketentraman dan keamanan negara. Kepentingan hukum masyarakat adalah kepentingan hukum mengenai ketentraman dan keamanan masyarakat. Kepentingan hukum perseorangan adalah kepentingan hukum dari seseorang, tetapi gangguan terhadap kepentingan hukum ini telah melibatkan kepentingan umum. Kepentingan hukum seseorang yang dilindungi dalam hukum pidana terdiri dari jiwa atau nyawa, badan, kehormatan atau nama baik dan kemerdekaan.

Hukum pidana memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum seseorang salah satunya adalah perlindungan terhadap jiwa atau nyawa seseorang melalui Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalkannya orang lain dengan catatan bahwa niat dari pelakunya itu harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>4</sup>

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil atau suatu *mateerieel delict*. Delik materiil atau delik dengan

---

<sup>3</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 18.

<sup>4</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

perumusan materiil adalah delik yang dianggap selesai (*vooltooid*) dengan timbulnya akibat yang dilarang. Delik material merupakan perbuatan yang nanti dianggap delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>5</sup>

Sesuai dengan Pasal 338 KUHP bahwa tindak pidana pembunuhan mempunyai unsur-unsur : barang siapa, dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain. Apabila semua unsur sudah terpenuhi maka hakim bisa mengadili pelaku dengan Pasal 338 KUHP. Namun sebelum mengadili hakim harus terlebih dahulu mengetahui apakah semua unsur telah terpenuhi atau tidak. Sebelum dapat memastikan tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim lebih dulu harus memastikan tentang tindakan atau perilaku mana yang sebenarnya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang berupa hilangnya nyawa orang lain.

Kasus Putusan Nomor 89/PID.B/2015/PN.Mrs ini merupakan kasus pembunuhan yang pelakunya didakwa dengan dakwaan subsidaritas. Dakwaan primairnya adalah Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidairnya adalah Pasal 338 KUHP dan dakwaan lebih subsidair adalah Pasal 351 ayat (3) KUHP. Namun dalam putusannya, hakim

---

<sup>5</sup> Frans Maramis, op.cit, hlm.76.

menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai tindak pidana pembunuhan. Sehingga Penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 89/PID.B/2015/PN.Mrs)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perkara Pidana Nomor 89/PID.B/2015/PN.Mrs ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan pada Perkara Pidana Nomor 89/PID.B/2015/PN.Mrs ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara pidana Nomor 89/PID.B/2015/PN.Mrs.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan pada perkara pidana Nomor 89/PID.B/2015/PN.Mrs.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana telah disinggung di muka, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan literatur tambahan dalam penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan.
3. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda yang berasal dari *Wet Van Strafrecht* (W.V.S). Kata *Strafbaarfeit* ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, perbuatan yang dapat dipidana dan peristiwa pidana. Kata *feit* itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>6</sup>

Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menerjemahkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan tertentu mengenai apa arti sebenarnya yang dimaksud dengan istilah *strafbaar feit* tersebut. Namun, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk

---

<sup>6</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

menjelaskan tentang arti dari istilah dari tindak pidana. Beberapa definisi tentang tindak pidana untuk memberikan penjelasan apa yang sebenarnya dimaksud dengan pengertian *strafbaar feit* atau tindak pidana, berikut penulis rangkum beberapa pandangan para ahli hukum.

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>7</sup>

Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu “sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>8</sup>

Van Hamel merumuskan sebagai berikut, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 182.

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 185.



dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>9</sup>

Namun, van der Hoeven tidak setuju apabila perkataan *strafbaar feit* itu harus diterjemahkan dengan perkataan perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena dari bunyi Pasal 10 KUHP itu dapat diambil dari suatu kesimpulan bahwa yang dapat dihukum itu hanyalah manusia dan bukan perbuatan.

Satochid Kartanegara juga sewaktu mengajar di dalam kuliah-kuliahnya juga menyatakan pendapat yang serupa dengan pendapat yang dinyatakan oleh van der Hoeven dan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* tersebut, almarhum telah menggunakan istilah tindak pidana. Sedangkan, menurut Wirjono Prodjodikoro. “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.”<sup>10</sup>

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur. Istilah unsur dipergunakan sebagai syarat yang diperlukan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dari pelaku dan yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang dan asas hukum umum. Untuk menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah suatu tindakan

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61

<sup>10</sup> Frans Maramis, *op.cit*, hlm. 58,

manusia, dimana tindakan seseorang tersebut telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

Unsur-unsur setiap tindak pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan, yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

#### **a. Unsur-unsur Subjektif**

Unsur-unsur subjektif adalah salah satu unsur pokok tindak pidana di samping unsur-unsur objektif. Unsur subjektif yang seperti dijelaskan diawal, merupakan keadaan dimana yang sifat melawan hukumnya terletak dalam hati sanubari pelaku sendiri. Unsur subjektif sering juga disebut sebagai unsur kesalahan.

Pada umumnya menurut para ahli hukum pidana, unsur-unsur subjektif terdiri dari tiga unsur, yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab dari pelaku,
2. Hubungan batin tertentu dari pelaku yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*),

3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku (alasan pembenar dan alasan pemaaf).

Kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk dalam unsur tertulis dari suatu pasal pidana sehingga tidak perlu dibuktikan. Walaupun kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk dalam unsur tertulis tetapi unsur ini harus ada untuk dapat dipidananya seorang pelaku. Kemampuan bertanggungjawab secara negatif dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang bahwa menganggap setiap orang mempunyai jiwa atau batin yang sehat sehingga setiap orang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Arti kemampuan bertanggungjawab banyak dihubungkan dengan ilmu pengetahuan, mengingat sukarnya untuk membuat perumusan yang tepat dalam undang-undang. Kemampuan bertanggungjawab dianggap sebagai keadaan batin orang normal, yang sehat. Van Hamel, mengadakan tiga syarat untuk mampu bertanggungjawab yaitu :<sup>11</sup>

1. Bahwa orang itu mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri,

---

<sup>11</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1993, hlm. 144.

2. Bahwa orang tersebut mampu menginsyafi perbuatannya bahwa bertentangan dengan ketertiban masyarakat,
3. Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu.

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab adalah Pasal 44 KUHP. Sedangkan yang dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP yang hanya mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab karena jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, dan tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya karena jiwa yang masih muda. Jadi, jika pelaku tidak mampu bertanggungjawab, pelaku akan dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum.

Unsur kesalahan selanjutnya adalah kesengajaan (*dolus*) dan ketidaksengajaan (*culpa*). Sikap batin yang akan dijabarkan pertama adalah yang mengenai kesengajaan (*dolus*). Menurut *memorie van toelichting*, kata dengan sengaja (*opzettelijk*) adalah sama dengan *willen en weten* (dikehendaki dan diketahui).<sup>12</sup> Hal ini mengungkapkan bahwa pada waktu melakukan tindak pidana, pelaku menghendaki (*willen*) akibat dari perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti (*weten*) hal-hal yang pelaku lakukan.

---

<sup>12</sup> Frans Maramis, op.cit., hlm. 119.

Kesengajaan dapat diartikan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dengan mengetahui unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang.

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :<sup>13</sup>

- (1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*),
- (2) Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dan
- (3) Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau *dolus eventualis*.

Sengaja sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan dimana orang-orang telah mengetahui atau mengerti situasi seperti apa akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya. Sengaja dengan kesadaran sebagai keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*), yang bersangkutan sebenarnya tidak menghendaki apa yang terjadi, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan demi mencapai tujuan yang lain. Sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*), taraf

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 121.

menghendakinya sudah sangat menurun. Terjadinya akibat dalam perbuatan ini sebenarnya tidak dikehendaki oleh pelaku, namun pelaku sudah mengetahui kemungkinan hal tersebut akan terjadi tapi pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

Selain kesengajaan yang menjadi unsur-unsur subjektif, kelalaiian atau *culpa* pun juga termasuk dalam unsur-unsur subjektif. Mengenai pengertian kelalaiian atau kealpaan (*culpa*) dan dasar pemikiran bahwa dipandang perlunya mengenakan pidana terhadap orang yang dengan *culpa* mengakibatkan timbulnya akibat dari tindak pidana.

Menimbulkan akibat dari tindak pidana, walaupun sikap batinnya tidak menghendakinya tetapi kelalaiannya atau kekeliruannya dalam batinnya menimbulkan hal yang dilarang adalah dikarenakan kurangnya perhatian atau tidak mengindahkannya larangan tersebut. Menurut H.B Vos, “unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan (*culpa*) yaitu : (1) pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat, dan (2) pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*).”<sup>14</sup>

Unsur subjektif yang terakhir adalah yang berkaitan dengan alasan penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm.125.

adalah alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana sekalipun telah mengakibatkan terjadinya akibat dari tindak pidana. Alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi dua bagian antara lain, alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar berkaitan dengan perbuatan dan alasan pemaaf berkaitan dengan sikap batin seseorang.

Salah satu yang termasuk dalam alasan pembenar adalah daya paksa dan pembelaan terpaksa. Dalam Pasal 48 KUHP, dinyatakan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Daya paksa merupakan perbuatan yang dilakukan orang, dimana fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya.

Pembelaan terpaksa, terdiri dari dua kata yaitu pembelaan dan terpaksa. Pembelaan yang dimaksud memiliki arti bahwa harus ada hal-hal yang memaksa terlebih dahulu sebelum terdakwa melakukan perbuatannya. Sedangkan, terpaksa diartikan tidak ada jalan lain bagi yang terkena untuk pada saat-saat itu menghalaukan serangan. Pasal 49 KUHP ayat 1 berbunyi,<sup>15</sup>

Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri

---

<sup>15</sup> Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1995, hlm. 64



atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

#### **b. Unsur-unsur Objektif**

Bagian yang bersangkutan dengan tingkah laku pelaku dan dengan keadaan sekitar pada waktu perbuatan dilakukan adalah bagian dari unsur objektif.<sup>16</sup> Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif sering juga disebut sebagai unsur perbuatan.

Pikiran harus disalurkan oleh perbuatan, dan perbuatan tersebut harus yang tampak keluar dilakukan, barulah hukum mengaturnya. *Cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.<sup>17</sup> Perbuatan yang diartikan secara luas, terdiri dari perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Adanya perbedaan antara perbuatan aktif dan perbuatan pasif ini membawa konsekuensi dalam perbedaan jenis-jenis delik yang dikenal perbedaan antara delik komisi (*commissie delict*), dimana seseorang melakukan suatu perbuatan

---

<sup>16</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm. 108.

<sup>17</sup> Frans Maramis, *op.cit*, hlm. 85.

aktif (*handelen*), dan delik omisi (*ommissie delict*), dimana seseorang mengambil sikap tidak berbuat.<sup>18</sup>

Unsur-unsur yang perlu ada untuk memenuhi syarat yang adanya suatu perbuatan (dalam arti luas) dalam arti hukum pidana, atau untuk adanya unsur atau elemen perbuatan pidana, yaitu:<sup>19</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan),
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
4. Unsur melawan hukum yang objektif,
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

## **B. Tindak Pidana Pembunuhan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

Di dalam Bab XIX Buku II KUHP mengatur mengenai kejahatan terhadap jiwa seseorang. Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslag*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Pembunuhan adalah suatu perbuatan kejahatan terhadap jiwa seseorang, yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dengan cara melawan hukum.

Menurut Lamintang, untuk sengaja menghilangkan jiwa orang lain itu “seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 86.

<sup>19</sup> Moeljatno, op.cit, hlm. 69.

ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut”.<sup>20</sup> Kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain yang tidak dikehendaki oleh undang-undang terjadi. Dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang barulah delik tersebut dianggap telah selesai, termasuk dalam delik yang bersifat materiil.

Unsur kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menikam dengan pisau (benda tajam), menembak menggunakan senjata api, memukul dengan alat berat, mencekik dengan tangan, memberikan racun, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja ataupun pengabaian. Selain itu perbuatan tersebut harus ditambah unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan yang akan datangnya akibat itu (*opzet bij mogelijk-heidsbewustzijn*).<sup>21</sup>

Dengan demikian, jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul berarti suatu tindak pidana pembunuhan belum dapat dikatakan sebagai delik selesai. Dalam suatu tindak pidana pembunuhan tersebut niatnya harus ditujukan untuk

---

<sup>20</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, loc.it.

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 68.

menghilangkan nyawa orang lain dan harus ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian seseorang.

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan**

### **a. Tindak Pidana Pembunuhan Biasa**

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk yang pokok ataupun yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *doodslag* itu diatur dalam Pasal 338 KUHP.<sup>22</sup> Tindak pidana pembunuhan biasa ini sering disebut dengan istilah tindak pidana pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. Dalam pasal 338 KUHP, yang rumusan berbunyi sebagai berikut : <sup>23</sup>

Barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan pidana hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan biasa ini terdiri dari:

- a) Unsur Subjektif : dengan sengaja
- b) Unsur Objektif : menghilangkan nyawa orang lain

Dalam kejahatan tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain tidak perlu segera terjadi, bisa saja dapat terjadi setelah korban

---

<sup>22</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, op.cit, hlm. 27.

<sup>23</sup> Soesilo, op.cit hlm. 240.

telah dirawat di rumah sakit. Seseorang harus melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang untuk dapat dikatakan melakukan pembunuhan.

Niat untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu tujuan dari perbuatan tersebut. Timbulnya akibat hilangnya nyawa orang lain dikarenakan ketidaksengajaan atau bukan menjadi tujuan atau maksud, perbuatan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Mempunyai niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan hal yang dimaksud dengan sengaja.

#### **b. Tindak Pidana Pembunuhan Berkualifikasi**

Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *gequalificeerde doodslag* itu oleh pembentuk undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 339 KUHP yang rumusan berbunyi sebagai berikut :<sup>24</sup>

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut atau jika kepergok pada waktu melakukan tindak pidana, untuk menjamin dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam tindak pidana, baik dalam usaha melepaskan diri dari pembedaan maupun dalam mempertahankan penguasaan atas benda yang telah diperoleh dengan melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 42.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berkualifikasi sebagai berikut :<sup>25</sup>

a) Unsur Subjektif :

Dilakukan dengan maksud untuk :

1) Mempersiapkan,

2) Mempermudah,

1) Jika kepergok :

1. Untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lain dari perbuatan itu dari hukuman, atau

2. Untuk menjamin pemilikan barang yang diperoleh dengan melawan hukum.

b) Unsur Objektif :

1) Perbuatan : menghilangkan nyawa,

2) Objeknya : nyawa orang lain,

3) Diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana.

Pembunuhan dalam pasal ini mempunyai hubungan erat dengan tindak pidana lain (perbuatan yang dapat dihukum). Namun, dalam kejahatan Pasal 339 ini pembunuhan (*doodslag*) adalah yang menjadi pokok. Tindak pidana ini merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan yang erat dimana tindak pidana

---

<sup>25</sup> Mochhamad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, 1986, hlm. 93.

lain harus menyertai atau mengikuti atau mendahului perbuatan itu hingga kedua tindak pidana itu dapat terjadi.

Pelaku digolongkan telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 339 KUHP, jika pelaku melakukan pembunuhan dan pelaku juga melakukan tindak pidana yang lain dalam perbuatannya. Meskipun memiliki hubungan antara tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana yang lain tapi pertanggungjawabannya harus dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri setiap perbuatan tindak pidana yang pelaku lakukan.

### **c. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *moord* itu diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :<sup>26</sup>

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagai berikut :

#### **a) Unsur Subjektif :**

1. Dengan sengaja,
2. Direncanakan lebih dulu (*voorbedachte raad*),

---

<sup>26</sup> Soesilo, op.cit, hlm. 241.



b) Unsur Objektif : menghilangkan nyawa orang lain

Sikap batin pelaku sebelum melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain menjadi hal yang membedakan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana. Dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana diperlukan waktu berpikir secara tenang bagi pelaku. Didalam tindak pidana pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pada tindak pembunuhan berencana terlebih dahulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.<sup>27</sup> Jangka waktu dapat digunakan sebagai petunjuk terjadinya tindak pembunuhan berencana, tetapi jangka waktu bukan merupakan bukti.

Unsur dengan sengaja dapat dihubungkan dengan unsur direncanakan lebih dulu sehingga hal ini dapat menjadi semua bentuk dari sengaja, bahkan sengaja dengan syarat. Unsur direncanakan dapat dilakukan pelaku dalam suatu jangka waktu dimana pelaku sudah mengetahui akibat yang akan menghilangkan nyawa orang. Meskipun pelaku mengetahui akibatnya tetapi pelaku tidak membatalkan niatnya, maka dapat dikatakan bahwa semua

---

<sup>27</sup> Mochamad Anwar, op.cit, hlm. 93.

unsur-unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu telah terpenuhi.

#### **d. Tindak Pidana Pembunuhan Anak**

Tindak pidana pembunuhan anak maksudnya adalah pembunuhan oleh ibunya sendiri dari seorang anak pada waktu atau tidak lama setelah dilahirkan dan yang didorong oleh ketakutan si ibu akan diketahui bahwa dia telah melahirkan seorang anak. Tindak pidana pembunuhan anak yang oleh pembentuk undang-undang disebut sebagai *kinderdoodslag* itu telah diatur dalam Pasal 341 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:<sup>28</sup>

Seorang ibu yang karena pengaruh perasaan takut akan diketahui bahwa ia telah melahirkan anak, dengan sengaja telah menghilangkan nyawa anaknya pada waktu atau segera setelah anak itu dilahirkan, karena bersalah telah melakukan pembunuhan anak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Dari rumusan Pasal 341 KUHP dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan anak adalah sebagai berikut :

a) Unsur Subjektif :

1. Dengan sengaja,
2. Takut diketahui telah melahirkan anak,

b) Unsur Objektif :

1. Seorang ibu,

---

<sup>28</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, op.cit, hlm. 58.

2. Menghilangkan nyawa anaknya :

- 1) Pada ketika anak itu dilahirkan, atau
- 2) Tidak berapa lama sesudah anak itu dilahirkan.

Dari perincian unsur-unsur tindak pembunuhan anak atau *kinderdoodslag* dapat diketahui bahwa ada bagian yang khusus dari unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak sebagai berikut :

1. Pembunuhan dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya sendiri,
2. Anak itu sedang dilahirkan atau tidak lama setelah anak dilahirkan,
3. Dengan alasan : Ibu dari anak terdorong oleh perasaan takut akan diketahui bahwa ia telah melahirkan seorang anak.

Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan tindak pidana pembunuhan anak atau *kinderdoodslag* seperti yang diatur dalam Pasal 341 KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya sendiri harus terjadi pada waktu atau segera setelah anaknya itu dilahirkan. Ini berarti bahwa pembunuhan terhadap seorang anak sedang dalam proses kelahirannya itu bukan lagi merupakan suatu pengguguran atau suatu *afdriving* melainkan telah merupakan suatu pembunuhan anak atau suatu *kinderdoodslag*.

Jangka waktu yang dimaksud anak sedang dilahirkan sulit untuk diprediksi atau ditetapkan. Secara umum, anak sedang dilahirkan ketika si ibu mulai merasakan rasa mulas dan mengalirnya air ketuban sampai dilahirkannya anak tersebut. Badan anak sudah tampak sedemikian rupa sehingga terhadap badan anak tersebut dapat dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa anak tersebut.

Selanjutnya yang dimaksud seorang ibu adalah seorang wanita yang belum menikah dimana wanita tersebut telah melahirkan seorang anak. Dari budaya dan kultur masyarakat dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan perasaan takut akan diketahui bahwa ia telah melahirkan anak itu sebenarnya adalah kekhawatiran akan mendapat malu, karena pelaku telah melahirkan seorang anak diluar pernikahan. Perasaan takut ini menjadi alasan untuk memberikan keringanan dalam hukuman yang diancamkan terhadap seorang ibu yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri.

#### **e. Tindak Pidana Pembunuhan atas Permintaan Korban**

Tindak pidana pembunuhan atas permintaan dari korban sendiri telah diatur dalam Pasal 344 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :<sup>29</sup>

Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu

---

<sup>29</sup> Soesilo, op.cit, hlm. 243.

sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 344 KUHP itu sama sekali tidak memiliki unsur subjektif melainkan hanya mempunyai unsur-unsur objektif yaitu sebagai berikut :

1. Menghilangkan nyawa orang lain,
2. Dilakukan atas permintaan orang itu,
3. Permintaan harus sungguh-sungguh.

Dalam rumusan Pasal 344 KUHP, walaupun unsur subjektifnya (dengan sengaja) tidak disyaratkan secara tegas, tetapi unsur tersebut sudah ada didalam rumusan ini. Selain hal tersebut, unsur adanya permintaan yang sifatnya tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu merupakan dasar yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. Permintaan korban sendiri harus dinyatakan secara tegas dan nyata, tidak cukup hanya dengan persetujuan saja, seperti orang yang putus asa, orang yang luka dalam peperangan, dan orang yang jatuh sakit dalam ekspedisi.

**f. Kesengajaan Mendorong Orang Lain Melakukan Bunuh Diri**

Kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri itu merupakan tindakan yang terlarang dan diancam dengan pidana

oleh undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 345 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : <sup>30</sup>

Barang siapa dengan sengaja mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau telah memberikan bantuan kepadanya untuk melakukan perbuatan seperti itu ataupun telah mengusahakan sarana-sarana baginya untuk melakukan perbuatan tersebut, maka jika perbuatan membunuh diri sendiri itu kemudian benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana selama-lamanya empat tahun.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 345 KUHP adalah sebagai berikut :

- a) Unsur Subjektif : dengan sengaja
- b) Unsur Objektif :
  - 1. Membujuk orang lain agar orang itu bunuh diri,
  - 2. Menolong orang lain bunuh diri,
  - 3. Memberikan bantuan daya upaya kepada orang lain untuk melakukan bunuh diri,
  - 4. Bunuh diri itu terjadi atau dilaksanakan.

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 345 KUHP dapat diketahui bahwa pelaku lah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri dengan perbuatan-perbuatan membantu dan mengusahakan sarana-sarana untuk melakukan bunuh diri. Perbuatan membantu orang lain melakukan bunuh diri itu harus

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm.82.

dilakukan oleh pelaku pada saat orang lain tersebut melakukan perbuatannya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Di dalam doktrin, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 345 KUHP sering disebut sebagai suatu ketentuan pidana yang sifatnya blangko atau kosong yang artinya bahwa pelaku hanya dapat dipidana jika orang yang dibujuk benar-benar meninggal . Hal itu terjadi karena, ketentuan pidana tersebut hanya mempunyai akibat hukum berupa dipidananya pelaku, jika pelaku melakukan keadaan atau akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang terjadi.

**g. Tindak Pidana Menyebabkan atau Menyuruh Menyebabkan Gugurnya Kandungan atau Matinya Janin yang Berada dalam Kandungan**

Tindakan pidana menyebabkan atau menyuruh menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan oleh wanita yang mengandung janin itu sendiri, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :<sup>31</sup>

Seseorang wanita yang dengan sengaja menyebabkan atau menyuruh orang lain menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

---

<sup>31</sup> Ibid, hlm. 86.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 346 KUHP adalah sebagai berikut :

- a) Unsur Subjektif : dengan sengaja
- b) Unsur Objektif :
  - 1. Perempuan :
    - 1) Menyebabkan gugurnya kandungan,
    - 2) Matinya kandungan,
  - 2. Menyuruh orang lain menyebabkan :
    - 1) Gugurnya kandungannya,
    - 2) Matinya kandungannya.

Dalam pasal ini terdapat dua jenis tindak pidana yaitu : <sup>32</sup>

- a. Perempuan atau ibu sendiri menyebabkan gugur atau mati kandungannya. Menyebabkan terletak dalam perbuatan seorang perempuan terhadap badannya sendiri,
- b. Perempuan atau ibu menyuruh orang lain menyebabkan gugur atau mati kandungannya : Ia membiarkan bahwa orang lain menyebabkan kandungan perempuan itu gugur atau mati, baik atas kemauan sendiri maupun atas permintaan perempuan itu sendiri.

### **C. Pidana dan Pemidanaan**

Pidana adalah hukuman dalam hukum pidana. Menurut Simons, pidana (*straf*) dikatakan sebagai nestapa khusus (*bijzonder leed*).<sup>33</sup> Ini

---

<sup>32</sup> Mochamad Anwar, op.cit, hlm. 99.



karena dibandingkan dengan hukuman perdata dan hukuman administrasi negara, hukuman pidana merupakan hukuman yang dianggap sebagai hukuman yang paling berat dan hanya diadakan apabila hukuman dalam bidang-bidang lain tidak memadai (*ultimum remedium*).

Hampir sama dengan pidana, pembedaan juga identik dengan penghukuman. Menurut Sudarto, menyatakan bahwa perkataan pembedaan itu sinonim dengan perkataan hukuman, yaitu “penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).” Sedangkan menurut Andi Hamzah, menyatakan bahwa pembedaan disebut sebagai penjatuhan pidana atau penghukuman, dalam Bahasa Belanda disebut *strafteoemeting* dan dalam Bahasa Inggris disebut *sentencing*.<sup>34</sup>

## 1. Tujuan Pidana

Menurut Lamintang, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan, yaitu :<sup>35</sup>

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,

---

<sup>33</sup> Frans Maramis, op.cit, hlm. 4.

<sup>34</sup> Tobib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 21.

<sup>35</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 11.

- 3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Terdapat banyak teori mengenai tujuan pidana yang dikenal sebagai teori pidana, yaitu teori tentang pembenaran dikenakan pederitaan berupa pidana terhadap seseorang. Beberapa teori diantaranya dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut :<sup>36</sup>

1. Teori-teori Absolut, disebut absolut karena menurut teori-teori ini pidana seharusnya merupakan sesuatu yang mutlak (absolut) menyusul dilakukannya kejahatan. Pidana dikenakan karena orang melakukan kejahatan (*quia peccatum*), bukannya untuk mencapai suatu tujuan yang lain.
2. Teori-teori Relatif, disebut relatif karena teori-teori ini mencari pembenaran pidana pada tujuan yang hendak dicapai dengan pidana. Pidana dikenakan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Teori-teori ini dapat dibagi atas :<sup>37</sup>
  - a. Teori Prevensi Umum, yaitu pencegahan ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan adanya pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan, maka

---

<sup>36</sup> Frans Maramis, op.cit, hlm. 231

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 233.

orang-orang lain (masyarakat) akan takut melaksanakan niatnya untuk melakukan kejahatan.

b. Teori Prevensi Khusus, yaitu pencegahan ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan supaya tidak lagi melakukan kejahatan.

3. Teori-teori Penyatuan atau Integratif, termasuk ke dalam kelompok teori ini adalah pandangan Grotius (1583-1654) bahwa, kodrat mengajarkan bahwa barang siapa melakukan kejahatan, ia akan terkena derita (aspek absolut), tetapi dalam menetapkan berat ringannya derita yang akan dikenakan tergantung pada kemanfaatan sosial (aspek relatif).

## **2. Jenis-jenis Pidana**

Dalam KUHP jenis-jenis pidana diatur dalam Buku I pada Pasal 10 yang menentukan bahwa pidana terdiri atas :<sup>38</sup>

1. Pidana Pokok :
  - a. Pidana mati,
  - b. Pidana penjara,
  - c. Pidana kurungan,
  - d. Pidana denda,
  - e. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan :
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
  - b. Perampasan barang-barang tertentu,
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dilaksanakan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di

---

<sup>38</sup>Soesilo, op.cit, hlm. 34.

tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pelaksanaan pidana mati kemudian diubah oleh UU Nomor 2 PnPs Tahun 1964, yaitu pidana mati yang dijatuhkan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati.<sup>39</sup>

Pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilaksanakan di satu tempat, asal saja terpisah (Pasal 28 KUHP).

Pidana penjara terdiri :<sup>40</sup>

- a. Pidana penjara seumur hidup,
- b. Pidana penjara selama waktu tertentu, yang lamanya :
  - 1) Paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun,
  - 2) Boleh dikenakan untuk 20 (dua puluh) tahun dalam hal :
    - a. Kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau
    - b. Dalam hal batas 15 tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP.

---

<sup>39</sup>Frans Maramis, op.cit, hlm. 241.

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 245

Pidana kurungan paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun. Jika ada pemberatan pidana karena perbarengan (*samenloop*) atau pengulangan (*recidive*) atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan.

Dalam KUHP ada ditentukan minimum umum untuk pidana denda, yaitu pidana denda paling sedikit Rp 3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen) (Pasal 30 ayat 1), tidak ada maksimum umum untuk pidana denda. Jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan.

Hukuman tutupan merupakan pengganti (altematif) terhadap pidana penjara dalam hal tertentu disebutkan dalam UU Nomor 20 Tahun 1946.<sup>41</sup> Menurut Bambang Waluyo, berlainan dengan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila :<sup>42</sup>

1. Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan,
2. Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

#### **D. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara**

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 234.

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 18.

Hakim yang menangani perkara pidana harus bertanggungjawab dan adil dalam memutuskan suatu perkara. Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat yuridis dan syarat non yuridis dalam memutuskan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang faktor-faktor terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.<sup>43</sup> Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya :

1. Dakwaan jaksa penuntut umum,
2. Keterangan saksi,
3. Keterangan terdakwa,
4. Barang-barang bukti.

### **2. Hal yang Meringankan dan Memberatkan Pidana**

Hakim harus teliti dan mengetahui segala latar belakang seorang terdakwa sebelum memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga harus memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa dalam putusannya.

---

<sup>43</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 147.

Menurut Sahetapy, hal-hal yang meringankan dalam persidangan adalah :<sup>44</sup>

1. Sikap *correct* dan hormat terdakwa terhadap persidangan dan pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan,
2. Pada kejahatan tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang publik,
3. Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya,
4. Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang akan dengan kekerasan melarikan diri dari penjara,
5. Terdakwa belum pernah di hukum tersangkut perkara kriminal.

Selain hal-hal yang disebutkan diatas, disebagian tindak pidana tertentu ada pula dicantumkan suatu hal yang meringankan dan hanya berlaku khusus untuk tindak pidana yang disebutkan saja dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Hal yang meringankan tersebar dalam pasal-pasal KUHP seperti tindak pidana pembunuhan pada Pasal 341 KUHP adalah pelakunya ibu dan objeknya adalah anaknya sendiri. Hal yang meringankannya adalah perasaan takut akan diketahui bahwa si ibu melahirkan

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm.151.

seorang anak sehingga si ibu melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri.

Dalam pasal-pasal KUHP tidak hanya terdapat hal-hal yang dapat meringankan bagi terdakwa tetapi juga terdapat hal-hal yang memberatkan terdakwa. KUHP hanya mengatur tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana yaitu sedang memegang suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), *recidive* atau pengulangan (Titel 6 Buku 1 KUHP), dan gabungan atau *concursum* (Pasal 65 dan 66 KUHP).<sup>45</sup>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini Pengadilan Negeri Maros dipilih sebagai lokasi penelitian. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan bahwa pada Pengadilan Negeri Maros telah tersedia data sekunder seperti, putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan pengadilan, berita acara pemeriksaan kepolisian, surat dakwaan *requisitor*. Semua data yang sangat diperlukan sebagai bahan analisis dalam menyelesaikan hasil penelitian.

##### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui

---

<sup>45</sup>Ibid, hlm. 149.



wawancara langsung kepada narasumber serta data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di bahas dalam tulisan ini.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Metode Penelitian**

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*).

- a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada

narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

## **2. Metode Pengumpulan Data**

- a. Wawancara (*interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas. Responden yang penulis akan wawancarai adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros.
- b. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini di Pengadilan Negeri Maros.

## **D. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perkara Pidana Nomor 89/PID.B/2015/PN.Mrs**

Berikut ini penulis akan menguraikan ringkasan posisi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 89/PID.B/2015/PN.Mrs, sebagai berikut :

##### **1. Posisi Kasus**

Kasus yang penulis teliti ini, dalam putusan Majelis Hakim dimana terdakwa yang bernama H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya

seseorang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekitar 10.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 bertempat di belakang Perumnas Bentenge, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Molle Dg. Gassing, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa pulang dari melayat keluarganya yang meninggal dunia, lalu terdakwa berniat mau pergi ke sawah namun pada saat di tengah perjalanan tiba-tiba terdakwa mendapat telepon yang menyampaikan jika kondisi bapak terdakwa semakin memburuk, kemudian terdakwa langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangan Maros untuk menjenguk bapak terdakwa yang sedang dirawat. Setelah melihat kondisi bapak terdakwa maka terdakwa pergi meninggalkan RSUD Salewangan dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah. Setelah sampai di tikungan ujung belakang Perumnas Bentenge, terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di sudut jalan sebelah kanan, dan pada saat itulah secara tiba-tiba datang korban Dg. Gassing yang langsung melompati terdakwa sambil menghunuskan badik yang diarahkan ke terdakwa namun secara cepat terdakwa langsung menjatuhkan dirinya kearah kiri sedangkan sepeda motor terdakwa dorong kearah kanan sehingga

korban Dg. Gassing terhalang dan tusukan badik korban tersebut tidak sampai mengenai tubuh terdakwa. Selanjutnya terdakwa segera berdiri kembali dan baru mengetahui jika yang hendak menikam terdakwa yaitu korban Dg. Gassing. Terdakwa langsung memegang gagang parangnya dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan korban mundur ke arah utara sambil memanggil terdakwa, terdakwa terus mengikuti korban secara perlahan sambil memegang gagang parang yang dibawanya. Setelah itu korban berbelok sambil tetap berjalan mundur ke lorong kecil di belakang Perumnas Bentenge. Selanjutnya di tanah lapang belakang Perumnas Bentenge tersebut korban berhenti sambil memegang badiknya dengan posisi menunggu terdakwa, kemudian terdakwa mendekati korban sambil menghunus parang yang dipegang dengan tangan kanan, setelah sekitar jarak empat meter antara korban dan terdakwa, sempat terjadi pembicaraan dan bersamaan dengan itu korban langsung melompati terdakwa sambil menghunuskan badiknya dengan maksud untuk menikam terdakwa, tetapi terdakwa menghindar ke arah kanan sambil tangan kirinya mendorong korban yang sedang memegang badik sedangkan tangan kanan terdakwa yang memegang parang langsung mengayunkan parangnya ke arah tangan kanan korban sebanyak satu kali dan mengenai pergelangan tangan kanan korban yang menyebabkan pergelangan tangan kanan korban nyaris putus dan badik yang dipegang korban jatuh ke tanah dan korban langsung

sempoyongan serta hampir tersungkur di tanah. Setelah itu terdakwa langsung membalikkan badannya kearah kiri serta langsung mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah kepala bagian belakang korban berkali-kali sehingga korban tambah sempoyongan. Selanjutnya terdakwa memindahkan parang yang dibawahnya ke tangan kiri lalu terdakwa mengambil badik milik korban lalu dengan tangan kanan terdakwa badik tersebut ditusukkan kearah perut korban ketika hendak lari sehingga perut korban robek dan ususnya terburai keluar, namun korban tetap berusaha lari sempoyongan tetapi hanya berputar-putar di tempat tersebut, dan beberapa menit kemudian korban terjatuh tertelungkup, pada saat korban hendak berdiri dan memiringkan badannya maka terdakwa langsung menusuk lagi bagian leher korban berkali-kali sampai korban tidak bergerak lagi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban Dg. Gassing mengalami luka-luka dan meninggal di tempat kejadian.

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dalam model dakwaan subsidaritas. Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso yang dibacakan di persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam Surat

Dakwaan Nomor Perkara Reg : PDM-42/Maros/Epp.2/2015 yang pokoknya mengatakan sebagai berikut :

### **KESATU**

Dakwaan Primair : Bahwa perbuatan terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 340 KUHP, yaitu :

#### **1. Barang siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso. Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapan, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang terdakwa lakukan. Terdakwa telah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan.

Terdakwa selanjutnya dihadapkan di persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan.

## 2. Dengan sengaja

Yang dimaksud dengan sengaja artinya tahu dan dikehendaki bahwa perbuatan tersebut memang terjadi. Unsur dengan sengaja dapat diketahui dari perbuatan pelaku yang memarangi dan menikam korban dengan parang secara terbuti-tubi. Yang pelaku lakukan dengan cara mengayunkan parang terdakwa kearah lengan kanan korban sebanyak satu kali dan mengenai pergelangan tangan korban yang menyebabkan pergelangan tangan korban hampir putus dan menyebabkan korban semponyongan. Setelah korban hampir tersungkur ke tanah, terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah kepala bagian belakang korban berkali-kali sehingga korban tambah semponyongan.

Setelah terdakwa mengambil parang milik korban, terdakwa langsung menikam perut korban saat korban hendak lari sehingga perut korban robek dan ususnya terburai keluar. Pada saat korban jatuh tertelungkup, terdakwa langsung tusuk lagi bagian leher korban berkali-kali sehingga korban tidak bisa bergerak lagi. Menurut teori kesengajaan, yaitu *wills thorie*, maka pelaku memang menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) perbuatan serta akibat perbuatannya.

## 3. Direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain

Yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam



dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Bahwa pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat perbuatannya. Dalam tindak perkara ini, terdakwa yang masih menyimpan dendam karena korban telah membunuh adiknya terdakwa pada tahun 1986, pada saat itu juga terdakwa berencana untuk membunuh korban. Sehingga timbul niat terdakwa yang ada didalam hatinya untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati tersebut waktunya sangat pendek karena pada saat itu korban menyerang terdakwa terlebih dahulu. Terdakwa sebenarnya memiliki kesempatan untuk tidak melayani korban untuk berduel namun karena niat balas dendam sudah ada didalam hatinya maka terdakwa pun membunuh korban pada saat itu.

## **KEDUA**

Dakwaan subsidair : bahwa perbuatan terdakwa H.Tallasa Dg.Tunru Bin Coreng Dg. Geso tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 338 KUHP yaitu :

### **1. Barang siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso. Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapan, baik

rohani maupun jasmani, mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang terdakwa lakukan. Terdakwa telah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan.

Terdakwa selanjutnya dihadapkan di persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan.

## 2. Dengan sengaja

Yang dimaksud dengan sengaja artinya tahu dan dikehendaki bahwa perbuatan tersebut memang terjadi. Unsur dengan sengaja dapat diketahui dari perbuatan pelaku yang memarangi dan menikam korban dengan parang secara terbuti-tubi. Yang pelaku lakukan dengan cara mengayunkan parang terdakwa kearah lengan kanan korban sebanyak satu kali dan mengenai pergelangan tangan korban yang menyebabkan pergelangan tangan korban hampir putus dan menyebabkan korban semponyongan. Setelah korban hampir tersungkur ke tanah, terdakwa langsung mengayunkan parang yang

dipegangnya ke arah kepala bagian belakang korban berkali-kali sehingga korban tambah semponyongan.

Setelah terdakwa mengambil parang milik korban, terdakwa langsung menikam perut korban saat korban hendak lari sehingga perut korban robek dan ususnya terburai keluar. Pada saat korban jatuh tertelungkup, terdakwa langsung tusuk lagi bagian leher korban berkali-kali sehingga korban tidak bisa bergerak lagi. Menurut teori kesengajaan, yaitu *wills thorie*, maka pelaku memang menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) perbuatan serta akibat perbuatannya.

### 3. Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur menghilangkan nyawa orang lain yang dimaksud disini adalah kematian korban Molle Dg. Gassing yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso. Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami luka-luka dan meninggal di tempat kejadian sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Salewangan Maros Nomor : 08/IDG/RSSM/III/2015 tanggal 16 Maret 2015.

### **KETIGA**

Dakwaan lebih subsidar : bahwa perbuatan terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHP, yaitu:

1. Penganiayaan

Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pinj*), atau luka.<sup>46</sup>

2. Dengan sengaja

Yang dimaksud dengan sengaja artinya tahu dan dikehendaki bahwa perbuatan tersebut memang terjadi. Unsur dengan sengaja dapat diketahui dari perbuatan pelaku yang memarangi dan menikam korban dengan parang secara terbuti-tubi. Yang pelaku lakukan dengan cara mengayunkan parang terdakwa kearah lengan kanan korban sebanyak satu kali dan mengenai pergelangan tangan korban yang menyebabkan pergelangan tangan korban hampir putus dan menyebabkan korban semponyongan. Setelah korban hampir tersungkur ke tanah, terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah kepala bagian belakang korban berkali-kali sehingga korban tambah semponyongan.

Setelah terdakwa mengambil parang milik korban, terdakwa langsung menikam perut korban saat korban hendak lari sehingga perut korban robek dan ususnya terburai keluar. Pada saat korban jatuh tertelungkup, terdakwa langsung tusuk lagi bagian leher korban

---

<sup>46</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Pelitea, Bogor, 1995, hlm. 245.

berkali-kali sehingga korban tidak bisa bergerak lagi. Menurut teori kesengajaan, yaitu *wills thorie*, maka pelaku memang menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) perbuatan serta akibat perbuatannya.

### 3. Mengakibatkan meninggalnya korban

Meninggalnya korban adalah akibat (ada hubungan kausal) dari perbuatan penganiayaan (memarangi dan menikam dengan parang) yang dilakukan oleh terdakwa. Namun meninggalnya korban bukan merupakan tujuan dari terdakwa tapi merupakan akibat dari perbuatan terdakwa.

Setelah memaparkan isi surat dakwaan beserta penjelasan unsur-unsurnya, maka di dalam sidang pengadilan, fokus pemeriksaan harus tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan. Apabila tidak terbukti, terdakwa dibebaskan dan apabila terbukti sebagai tindak pidana maka terdakwa dijatuhi pidana. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dipidana.

### 3. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana ini menuntut terdakwa sebagai berikut :

#### **MENUNTUT**

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP (dalam dakwaan subsidiar);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1) 1 (satu) bilah parang yang berlumuran darah dengan panjang besi 37 cm dan lebar besi 3 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna krem kayu serta sarung parang terbuat dari kayu berwarna krem, 1 (satu) bilah badik yang berlumuran darah dengan panjang besi 25,5 cm dan lebar besi 4,7 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna krem kayu, 1 (satu) lembar celana kain puntung berwarna putih, 1 (satu) lembar baju kaos merek aoyagelang 52 bermotif garis-garis warna hitam tak beraturan, 1 (satu) lembar sarung sutra berwarna merah mudah, 1 (satu) buah songkok haji berwarna putih kuning (milik terdakwa), 1 (satu) buah sarung badik yang terbuat dari kayu yang diikat menggunakan tali berwarna hitam lalu kemudian diikatkan pada sebuah kopelrim berwarna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang (ring kecil) yang terbuat dari kulit berwarna cokelat, 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam, 1 (satu) buah topi rimba berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek bermotif loreng tentara yang berlumuran darah, dan 1 (satu) lembar baju kaos berwarna cokelat bertuliskan sabhara yang berlumuran darah masing-masing untuk dimusnakan;
  - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki smash 110 nomor polisi DD 4083 ED warna hitam dikembalikan kepada saksi Rahmatia Dg. Ngasi alisa Mama Muli (istri korban);
  - 3) 1 (satu) buah handphone merek nokia *corporation* type RM 969 warna hitam dengan nomor kartu 085298835525 dikembalikan kepada saksi Rahmatia Dg. Ngasi alias Mama Muli (istri korban);
  - 4) 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam type RH 125 dengan nomor kartu 081241779350 dikembalikan kepada terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso;
  - 5) 1 (satu) buah handphone merek nokia X2 warna putih dengan nomor kartu 0813422206715 dikembalikan kepada saksi milik saksi Haryanto Bani Bin Coreng Dg. Geso;

- 6) 1 (satu) buah handphone merek samsung *duos* warna putih dengan nomor 082396747327 dikembalikan kepada saksi Andi Ibrahim Dg. Tawang alias Bora Bin Coreng Dg. Geso;
- 7) 1 (satu) lembar kertas *call data record* nomor handphone +62852988355525 dari telkomsel tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

#### **4. Amar Putusan**

Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 oleh Kemal Tampubolon S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Baryanto S.H.,LLM dan Jenny Tulak S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Marwati S.H Panitera Penggati pada Pengadilan Negeri Maros dan dihadiri oleh Jatmiko Raharjo S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan terdakwa, serta Penasihat Hukumnya. Maka Pengadilan Negeri Maros yang berkompeten menyidangkan dan memeriksa perkara tindak pidana sebagaimana telah dikemukakan diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menjatuhkan *vonnis* atau putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti :
  - 1) 1 (satu) bilah parang yang berlumuran darah dengan panjang besi 37 cm dan lebar besi 3 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna krem kayu serta sarung parang terbuat dari kayu berwarna krem, 1 (satu) bilah badik yang berlumuran darah dengan panjang besi 25,5 cm dan lebar besi 4,7 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna krem kayu, 1 (satu) lembar celana kain puntung berwarna putih, 1 (satu) lembar baju kaos merek aoyagelang 52 bermotif garis-garis warna hitam tak beraturan, 1 (satu) lembar sarung sutra berwarna merah mudah, 1 (satu) buah songkok haji berwarna putih kuning (milik terdakwa), 1 (satu) buah sarung badik yang terbuat dari kayu yang diikat menggunakan tali berwarna hitam lalu kemudian diikatkan pada sebuah kopelrim berwarna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang (ring kecil) yang terbuat dari kulit berwarna cokelat, 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam, 1 (satu) buah topi rimba berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek bermotif loreng tentara yang berlumuran darah, dan 1 (satu) lembar baju kaos berwarna cokelat bertuliskan sabhara yang berlumuran darah masing-masing untuk dimusnakan;
  - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki smash 110 nomor polisi DD 4083 ED warna hitam dikembalikan kepada saksi Rahmatia Dg. Ngasi alisa Mama Muli (istri korban);
  - 3) 1 (satu) buah handphone merek nokia *corporation* type RM 969 warna hitam dengan nomor kartu 085298835525 dikembalikan kepada saksi Rahmatia Dg. Ngasi alias Mama Muli (istri korban);
  - 4) 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam type RH 125 dengan nomor kartu 081241779350 dikembalikan kepada terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso;
  - 5) 1 (satu) buah handphone merek nokia X2 warna putih dengan nomor kartu 0813422206715 dikembalikan kepada saksi milik saksi Haryanto Bani Bin Coreng Dg. Geso;



- 6) 1 (satu) buah handphone merek samsung *duos* warna putih dengan nomor 082396747327 dikembalikan kepada saksi Andi Ibrahim Dg. Tawang alias Bora Bin Coreng Dg. Geso;
- 7) 1 (satu) lembar kertas *call data record* nomor handphone +62852988355525 dari telkomsel tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Menyatakan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## **5. Analisis Penulis**

Penulisan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yaitu cermat, jelas dan lengkap. Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa. Ketelitian tersebut dapat diketahui pada saat Penuntut Umum mendakwakan Pasal 340 KUHP dikarenakan ada kemungkinan terdakwa mempunyai dendam terhadap korban karena korban telah membunuh adik terdakwa. Penuntut Umum juga mendakwakan Pasal 351 ayat (3) yang bisa saja terdakwa tidak menghendaki meninggalnya korban setelah melakukan penganiayaan, sehingga dalam surat dakwaan tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak terbuktinya surat dakwaan.

Penuntut umum juga mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan sekaligus memadukan dengan uraian fakta perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan. Surat dakwaan juga diuraikan dengan mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap.

Tuntutan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, sekiranya sudah tepat. Tuntutan tersebut telah sesuai dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa yang maksimal hukumnya adalah 15 (lima belas) tahun penjara namun telah dikurangi menjadi 7(tujuh) tahun dikarenakan tindakan korban yang melakukan penyerangan terlebih dahulu terhadap terdakwa. Tuntutan Penuntut Umum dapat membuat jera terdakwa, mampu menimbulkan dampak efek pencegahan dan lebih memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban dan terdakwa.

Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros menyatakan terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primair, membebaskan terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso dari dakwaan primair, menyatakan terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa tergolong ringan dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun terhadap terdakwa tidak akan memberikan efek jera terhadap terdakwa dan tidak memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban dimana korban meninggal dengan cara yang mengenaskan. Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan pidana dengan menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

**B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap  
Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan pada Perkara Pidana  
Nomor 89/PID.B/2015/PN.Mrs**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 89/PID.B/2015/PN.Mrs, berdasarkan beberapa pertimbangan. Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca surat dakwaan tersebut, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Adapun alat bukti yang didapatkan yaitu :

- 1) Keterangan saksi-saksi yaitu Lina Dg. Tino Binti Puang Masiga, Jalali Dg. Rala Bin Saleng, Andi Ibrahim Dg. Tawang alias Bora Bin Geso, Andi Hariyanto Bani Bin Coreng Dg. Geso, Bripka Irwan Bin Tajuddin, Makkulau Karaeng Lanti Bin Makanong, Adsan Syahputra Bin Adnan KS Putra, Maggu Dg. Tunru Bin Dg. Lira Malyu, Hj. Kima Dg. Nurung Binti Sudding, Halia alias Lia Binti Dg. Tappa, Rahmatia Dg. Ngasi alias Mama Muli Binti Dg. Tappa, Doratinah Binti Subagio, Sammi Dg. Ngitan Bini Coreng Dg. Geso
- 2) Alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* dari RSUD Salewangan Maros Nomor : 08/IDG/RSSMIII/2015 tanggal 16 Maret 2015, hasil pemeriksaan laboratorium *forensik* Polri cabang Makassar dengan nomor Lab : 799/KBF/IV/2015 tanggal 29 April 2015 dan kertas *call data record* nomor handphone +6285298835525 dari Telkomsel.
- 3) Barang bukti :
  - a. 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 37 cm bergagang kayu serta bersarung kayu milik H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso;
  - b. 1 (satu) bilah badik dengan panjang besi 25,5 cm bergagang kayu milik Molle Dg. Gassing;
  - c. 1 (satu) lembar celana kain puntung berwarna putih milik H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso;

- d. 1 (satu) lembar baju kaos merek aoyagelang 52 bermotif garis-garis warna hitam tak beraturan milik H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng;
  - e. 1 (satu) lembar sarung warna merah muda milik H. Tallasa Dg. Geso;
  - f. 1 (satu) buah sarung badik terbuat kayu yang diikat tali berwarna hitam dan kopelrim berwarna hitam milik korban Molle Dg. Gassing;
  - g. 1 (satu) lembar celana pendek bermotif loreng tentara milik korban Molle Dg. Gassing;
  - h. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat bertuliskan shabara milik korban Molle Dg. Gassing.
- 4) Keterangan terdakwa yaitu H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso.
- 5) Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sehingga terdapat petunjuk yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, yang juga merupakan bukti yang cukup tentang perbuatan terdakwa.

Di persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa mengakui telah memarangi dan menikam korban Molle Dg. Gassing sehingga terluka parah dan meninggal dunia di tempat kejadian. Terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa telah

memarangi lalu menikam korban yakni pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekitar pukul 10.30 WITA di belakang Perumnas Bentengnge, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya dapat bertemu dengan korban karena saat itu terdakwa dari melayat keluarganya yang meninggal dunia di dekat rumah terdakwa, lalu terdakwa kembali ke rumah dan berniat mau ke sawah, dan saat perjalanan ke sawah dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa mendapat telepon dari saudara saksi Sammi yang menyampaikan jika kondisi bapak terdakwa yaitu Dg. Geso memburuk, terdakwa kemudian langsung ke RSUD Salewangan Maros. Setelah melihat kondisi bapak terdakwa di rumah sakit sudah stabil kembali, maka pada sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa kemudian meninggalkan rumah sakit menuju ke rumah dengan mengambil route jalan pintas yakni jalan poros belakang Maccopa – ke Barambang – ke Perumnas Bentengnge – ke tempat pembuangan sampah akhir – ke rumah terdakwa. Terdakwa memang sering melalui route tersebut, karena selain lebih dekat dan jalanannya juga bagus.

Saat berada di tikungan ujung belakang Perumnas Bentengnge, terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di sudut jalan sebelah kanan, dan saat itulah secara tiba-tiba korban melompati terdakwa sambil menghunus badiknya dan ditusukkan ke arah diri terdakwa.

Terdakwa kemudian secara cepat menjatuhkan diri terdakwa ke arah kiri sedangkan sepeda motor terdakwa dorong ke arah kanan sehingga korban yang mau menikam terdakwa menjadi terhalang dan tusukan badiknya tidak sampai ke badan terdakwa. Terdakwa kemudian segera berdiri kembali.

Terdakwa langsung memegang hulu parang miliknya dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan korban mundur ke arah utara tapi sambil memanggil terdakwa dan melambaikan tangan kanannya yang pegang badik sambil berkata, "Kamu ke sini, kita saling tikam", terdakwa terus mengikutinya secara perlahan sambil tetap waspada dan memegang hulu parang terdakwa, tapi setiap kali terdakwa sudah mendekati korban, maka korban kemudian mundur lagi ke lorong dalam Perumnas Bentengnge tapi tetap memanggil terdakwa dengan melambaikan tangan kanannya yang memegang badik.

Saat terdakwa di posisi pertigaan lorong tersebut terdakwa sempat menelpon adiknya yaitu Bora yang ternyata posisinya masih ada di rumahnya di Dusun Sentosa Carangki, terdakwa kemudian mengatakan, "Ke sini sekarang, saya ditikam Dg. Gassing" setelah itu telepon terdakwa matikan lalu terdakwa mengikuti lagi korban yang sambil berjalan mundur tetap memanggil-manggil terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang badik sambil berkata, "Kau kesini saja, kita saling tikam". Setelah itu korban berbelok sambil tetap berjalan mundur lagi ke lorong kecil yang ternyata ada rumah

panggung dan ada tanah lapang di depannya (di belakang Perumnas Bentengnge). Selanjutnya di tanah lapang itulah korban berhenti sambil menunggu terdakwa, sedangkan terdakwa kemudian mendekatinya sambil menghunuskan juga parangnya dengan tangan kanan.

Sekitar empat meter jarak terdakwa dengan korban, terdakwa sempat mengatakan, “Kenapa kamu begini, sedangkan saya tidak pernah melakukan apapun kepadamu” tapi korban yang sudah sangat emosi menjawab, “Saya memang ingin membunuhmu” dan bersamaan dengan itu korban langsung melompati terdakwa sambil menyerongkan badiknya untuk menikam terdakwa, tetapi terdakwa menghindari ke arah kanan sambil tangan kiri terdakwa mendorong tangan kanan korban yang memegang badik sedangkan tangan kanan terdakwa yang memegang parang.

Kemudian terdakwa mengayunkan dan memarangi lengan kanan korban sebanyak satu kali tebas sekuat tenaga sehingga pergelangan tangan kanan korban hampir putus dan badik yang dipegang korban terjatuh ke tanah dan korban juga sempoyongan dan serta mau tersungkur ke tanah, kesempatan itu terdakwa gunakan untuk memarangi kepala korban bagian belakang. Selanjutnya terdakwa memindahkan parangnya dari tangan kanan ke tangan kiri, lalu tangan kanan terdakwa memungut badik korban dan dengan tangan kanan badik tersebut terdakwa tusukkan ke arah perutnya korban yang bersamaan dengan korban mau lari lagi, sehingga perut



korban robek dan ususnya terburai, tetapi korban tetap lari sempoyongan namun hanya berputar-putar di tempat itu.

Beberapa menit kemudian, korban terjatuh tertelengkup, saat korban hendak berdiri dan memiringkan badannya, maka terdakwa langsung tusuk lagi bagian leher korban berkali-kali sampai korban tidak bergerak lagi. Selanjutnya terdakwa kemudian memasukkan parang miliknya kedalam sarungnya, kemudian terdakwa meninggalkan mayat korban sambil tetap memegang badik korban dengan menggunakan tangan kanannya, dan terdakwa berjalan ke arah pohon mangga, lalu menuju ke tikungan belakang Perumnas Bentengnge, saat terdakwa sudah berada di pinggir jalan, terdakwa melihat di dekat motor terdakwa, sudah ada berdiri saudara terdakwa yaitu saksi Bani, selanjutnya terdakwa kemudian menyuruh saksi Bani mengendarai sepeda motor terdakwa serta menjemput terdakwa di pinggir jalan dan saat itulah datang juga saudara terdakwa yaitu saksi Bora mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa menyuruhnya segera pulang dengan mengatakan, “Kamu pulang saja, sudah selesai” sehingga saksi Bora memutar arah sepeda motornya dan terdakwa kemudian naik diboncengan saksi Bani lalu mereka beriringan meninggalkan Perumnas Bentengnge menuju rumah terdakwa.

Setibanya di rumah terdakwa, maka badik korban yang terdakwa pegang dan masih berlumuran darah kemudian terdakwa simpan di sebuah bale-bale di bawah kolong rumah terdakwa sambil mengatakan

kepada saksi Bora, “Telepon Polisi, karena saya dapat masalah” dan sekitar 30 menit kemudian datang beberapa Polisi dari Polsek Mandai menjemput terdakwa. Terdakwa menjelaskan jika terdakwa melakukan pamarangan dan penusukan sedemikian rupa sehingga korban kehilangan nyawa dalam kondisi mengenaskan karena terdakwa berpikir walaupun terdakwa hanya menebas satu kali lengan korban sampai hampir putus, terdakwa juga pasti masuk penjara, jadi lebih baik terdakwa melampiaskan saja kekesalan terdakwa kepada korban yang sudah berkali-kali mau membunuh terdakwa, karena tetap juga resikonya adalah terdakwa masuk penjara.

Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sudah dua kali dihadang oleh korban yakni di daerah Biringkaloro Kecamatan Tanralili sekitar dua tahun yang lalu dan mau melakukan kekerasan terhadap dirinya, namun satu kali terdakwa berhasil menghindar dan satu kalinya lagi terdakwa tidak bisa menghindar dan akhirnya terdakwa melawan tapi korban lari naik ke rumahnya orang setelah melihat terdakwa membawa badik. Terdakwa saat itu membawa senjata tajam berupa parang karena terdakwa tidak sempat lagi kembali ke rumah untuk menyimpan parang terdakwa yang biasa terdakwa pakai kalau pergi ke sawah, karena tiba-tiba ada telepon dari adik terdakwa jika kondisi bapak terdakwa di RSUD Salewangan Maros memburuk, sehingga terdakwa kemudian segera ke rumah sakit melalui jalan alternatif di bagian belakang Maccopa tembus ke RSUD Salewangan Maros dan

parang tersebut terdakwa sembunyikan dibalik sarung dan baju terdakwa, supaya tidak terlalu kelihatan.

Terdakwa sebelumnya tidak pernah berkomunikasi atau menyuruh orang lain untuk berkomunikasi dengan korban untuk bertemu di Perumnas Bentengnge. Saat kejadian korban berbau minuman keras (ballo). Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut dan memohon maaf kepada Allah SWT dan kepada keluarga korban Molle Dg. Gassing.

Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya pernah bertemu dengan korban sebelum terdakwa melakukan serangkaian kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, terdakwa pernah berpapasan dengan korban pada hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 WITA saat terdakwa pergi melayat ke rumah duka Dg. Ngata di kampung Patadang yang tidak terlalu jauh dari rumah milik terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak sempat berkomunikasi dengan korban yang mana saat itu korban sedang keluar dari rumah duka dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa baru mau masuk ke dalam rumah duka dengan menggunakan sepeda motor juga. Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, mulai terdakwa terbangun dari tidur, terdakwa hanya pernah menerima telepon dari adik terdakwa yaitu saksi Sammi yang menjelaskan bahwa kesehatan orang tua terdakwa memburuk, dan terdakwa juga hanya pernah menelpon saksi Bora sesaat sebelum

terdakwa membunuh korban dan terdakwa tidak pernah menggunakan telepon miliknya setelah itu.

Adapun waktu terdakwa mulai diserang pertama kali sampai terdakwa mengikuti korban dan melakukan serangkaian kekerasan yang mengakibatkan korban Molle Dg. Gassing meninggal dunia di tempat kejadian, terdakwa tidak tahu pasti, namun tidak cukup satu jam lamanya. Setelah kejadian terdakwa langsung menuju arah tikungan melalui jalan setapak (belakang Perumnas Betengnge) dekat pohon mangga depan rumah panggung, dan pertama kali yang terdakwa lihat adalah saksi Bora yang mana saat itu terdakwa sedang berjalan keluar dan posisi saksi Bora masih berada di jalan, dan sempat turun dari sepeda motor miliknya dan setelah terdakwa sampai di jalan, kemudian terdakwa mencuci tangan terdakwa yang berlumuran darah, lalu terdakwa juga melihat saksi Bani datang dari arah utara, kemudian terdakwa menyuruhnya untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa.

Selain daripada saksi Bani dan saksi Bora terdakwa tidak pernah melihat ataupun bertemu dengan orang lain. Tidak ada orang lain yang membantu terdakwa melakukan pembunuhan tersebut melainkan hanya terdakwa sendiri saja. Adapun posisi korban Molle Dg. Gassing pada saat terdakwa menebas pergelangan tangannya yang mengakibatkan nyaris putus, korban langsung berputar kearah kiri dan keluar dari pintu pagar (berlari ke sekitar TKP) dan kesempatan itulah terdakwa gunakan untuk menghujani korban dengan tebasan parang.

Terdakwa tidak mengingat lagi berapa kali terdakwa melakukan pemarkaran terhadap korban karena terdakwa sudah emosi.

### **1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan pemidanaan suatu tindak pidana sangat bergantung pada hakim yang merumuskan dasar pertimbangan. Adapun dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor : 89/PID.B/2015/PN.Mrs adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pertimbangan atas surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Perkara Reg : PDM-42/Maros/Epp.2/06/2015 tertanggal 24 Juli 2015;
2. Melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap nota pembelaan yang dibacakan di persidangan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 15 September 2015, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya, bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;
3. Adanya saksi-saksi yang diperiksa untuk memberikan keterangan dalam sidang pengadilan dan telah disumpah terlebih dahulu;
4. Dalam persidangan terdakwa membenarkan keterangan;
5. Adanya suatu alat bukti surat yang dibacakan pada proses pemeriksaan yaitu *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan Nomor : 08/IDG/RSSM/III/2015 tanggal 16 Maret

2015, selemba kertas *Call Data Record* nomor handphone +6285298835525 dari Telkomsel, dan pemeriksaan laboratorium *forensik* Polri cabang Makassar dengan nomor Lab : 799/KBF/IV/2015 tanggal 29 April 2015;

6. Majelis Hakim menghubungkan antara hasil pemeriksaan dalam *Visum Et Repertum*, laboratorium *forensik* Polri, dan *Call Data Record* tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim.
7. Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa.
8. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan meninggal di tempat kejadian sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Salewangan Nomor : 08/IDG/RSSM/III/2015 tanggal 16 Maret 2016.
9. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan berharap mendapatkan putusan yang ringan-ringannya.
10. Terdakwa mengetahui atau menyadari bahwa akibat dari perbuatannya menikam korban Molle Dg. Gassing adalah

perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa Molle Dg. Gassing, hal ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Molle Dg. Gassing;

11. Majelis Hakim menimbang bahwa salah satu unsur Pasal 340 KUHP dalam dakwaan primair yaitu unsur direncanakan terlebih dahulu tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

12. Majelis Hakim menimbang bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

13. Dakwaan subsidair telah terbukti, maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

14. Majelis Hakim menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan

yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

15. Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dalam dakwaan subsidair dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana.

16. Majelis Hakim mempertimbangkan adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

17. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
- b. Perbuatan terdakwa dimulai dari perlakuan korban yang hendak menikam terdakwa, sehingga terdakwa meluapkan emosi dan melakukan pembelaan diri secara berlebihan dengan menyerang korban.



18. Untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu pertimbangan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi *sosio-yuridis*, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan tidak jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.

Setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan dan dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka terdakwa dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani biaya perkara. Mengingat Pasal 338 KUHP dan Pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## **2. Putusan Hakim**

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum.

Berdasarkan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP maka Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso telah terbukti

secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair yang dibuat oleh Penuntut Umum.

### **3. Analisis Penulis**

Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kata mengadili selalu dikaitkan dengan profesi hakim karena kata mengadili ini dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara. Hakim juga harus menjunjung tinggi tiga asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi di masyarakat, hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana.

Pertimbangan hukum hakim menjadi dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Fakta di persidangan merupakan dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan Majelis Hakim sebelum Majelis Hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu perkara atau terdakwa patut dihukum atas

perbuatannya yang terungkap di persidangan. Secara sederhana, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Jika Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu untuk mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.<sup>47</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Hakim (Baryanto S.H., LL.M., wawancara tanggal 16 Desember 2015) yang memberikan gambaran secara umum terhadap kasus yang penulis angkat yang menyatakan bahwa :

Pertimbangan hakim berdasarkan dengan sistem pembuktian *negatief wetelijk stelsel* yaitu sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim. Alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Fakta di persidangan juga harus diperhatikan dan membutuhkan kejelian dalam mengetahui kejadian yang sebenarnya sehingga dapat

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 19.

memperoleh keyakinan yang dapat membuat keputusan yang dianggap adil.

Dalam putusan hakim memutuskan bahwa terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Molle Dg. Gassing. Menurut penulis, unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan telah terpenuhi disertai dengan pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dan sudah tepat jika terdakwa dikenakan Pasal 338 KUHP.

Hakim Pengadilan Negeri Maros (Baryanto S.H., LLM.) menjelaskan bahwa :

Meskipun terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban karena melakukan perlawanan atas perbuatan korban yang memarangi terdakwa terlebih dahulu tetapi hal tersebut tidak termasuk sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan sebagai pembelaan terpaksa. Pembelaan diri muncul dari keadaan refleksi dan ketika pembelaan itu berlebihan serta adanya unsur kesengajaan untuk membunuh, maka itu bukan termasuk pembelaan terpaksa.

Tidak adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas pembelaan terpaksa dalam perkara ini, dimana unsur dari pembelaan terpaksa tidak terpenuhi. Unsur-unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah :<sup>48</sup>

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa,

---

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 158.

2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain,
3. Adanya serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu,
4. Serangan itu melawan hukum,

Pembelaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan asas *proporsionalitas* dan asas *subsidiaritas*. Dimana harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang disatu pihak dengan kepentingan yang dikorbankan (asas *proporsionalitas*). Serangan juga tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan (asas *subsidiaritas*).<sup>49</sup> Secara sederhana, bahwa pembelaan jadi tidak dibenarkan selama orang tersebut bisa melarikan diri. Dalam perkara ini, walaupun korban yang melakukan penyerangan lebih dahulu dan senjata yang digunakan seimbang yaitu sama-sama menggunakan parang, namun terdakwa dalam perkara ini tidak melarikan diri dan malah melakukan penyerangan balik dengan membunuh korban.

Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan sanksi pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut 7 (tujuh) tahun penjara sedangkan putusan hakim adalah 5 (lima) tahun. Yang menjadi dasar peringanan sanksi pidana pada terdakwa adalah korbanlah yang pertama kali ingin menikam dan memarangi terdakwa.

---

<sup>49</sup> Ibid, hlm. 158-159.

Hakim Pengadilan Negeri Maros (Baryanto S.H., LLM.)

menjelaskan bahwa :

Dalam menjatuhkan putusan, setiap hakim mempunyai pertimbangan masing-masing termasuk dalam hal menentukan tinggi dan rendahnya hukuman bagi terdakwa. Pertimbangan hakim untuk perkara ini menggunakan asas *dominus litis* dan melihat korbanlah yang lebih dulu ingin menikam dan memarangi terdakwa. Sehingga hakim memutuskan perkara dengan hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum.

Namun jika dilihat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 7 (tujuh) tahun sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa korban dengan cara yang sadis dan mengenaskan. Hal itu dapat dilihat dari hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Salewangan Nomor : 08/IDG/RSSM/III/2015. Hasil pemeriksaannya korban masuk dalam keadaan meninggal dunia dan diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, kurang tepat. Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa tergolong ringan dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun terhadap terdakwa tidak akan memberikan efek jera terhadap terdakwa dan tidak memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban dimana korban meninggal dengan cara yang sadis dan mengenaskan. Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan pidana dengan menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Meskipun penulis menyadari, bahwa instrument pidana meskipun dengan tegas bukanlah satu-satunya upaya yang dapat menanggulangi dan memberantas tindak pidana pembunuhan tetapi pemberian sanksi pidana yang tepat diharapkan dapat memberikan efek *prevensi general* dimana masyarakat akan berusaha menaati hukum karena takut akan sanksi pidananya. Pemberian sanksi pidana yang tepat dapat juga memberikan efek jera bagi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi (*prevensi special*).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penulis dalam bab pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Perkara Pidana Nomor 89/PID.B/2015/PN.Mrs telah sesuai. Majelis Hakim menyatakan terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair. Tidak terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dikarenakan unsur direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain tidak terbukti di Pengadilan. Walaupun adik terdakwa pernah dibunuh oleh korban, namun kejadian meninggalnya korban bukan merupakan tindak pidana yang direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa dan kejadian ini terjadi karena korban yang menyerang terdakwa terlebih dahulu.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan pada Perkara Pidana Nomor 89/PID.B/2015/PN.Mrs, kurang tepat. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Tallasa Dg. Tunru Bin Coreng Dg. Geso dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa



tergolong ringan dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun terhadap terdakwa tidak akan memberikan efek jera terhadap terdakwa dan tidak memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban dimana korban meninggal dengan cara yang sadis dan mengenaskan. Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan pidana dengan menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian penulis dalam bab pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penulis mengharapkan kepada para penegak hukum harus tegas dalam menindaki suatu perbuatan tindak pidana terkhusus pada tindak pidana pembunuhan. Penjatuhan sanksi harus sekiranya membuat para pelaku kejahatan jera sehingga mampu mengurangi terjadinya tindak pidana.
2. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seyogianya tidak hanya berorientasi hanya kepada pelaku saja tetapi juga perlu difikirkan sejauh mana dampak perbuatan pelaku tersebut bagi korban dan keluarga korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali. 2011. *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_.1995. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*, Bandung : Reflika Aditama.
- Mochamad Anwar. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung : Alumni.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mohammad Hatta. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta : Liberty.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.

Soesilo. 1995. Kitab *Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politeia.

Tajul Arifin. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia.

Van Bemmelen. 1984. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung : Bina Cipta.

Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)